

IDENTITAS AGAMA DAN SUKU MASYARAKAT ADAT PASCA KONFLIK BERDARAH DI HALMAHERA UTARA

Gloria M.P Djurubassa

Dosen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Halmahera
Jl. Raya Wari, Wari Ino, Tobelo, Halmahera Utara, Maluku Utara

Email : ipalakoka@gmail.com

ABSTRAK

Tragedi berdarah di Halmahera Utara seharusnya merupakan catatan kritis bangsa Indonesia, karena jika konflik terus terjadi maka peluang untuk melahirkan disintegrasi bangsa semakin besar. Hal ini mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat seperti ideologi politik, agama, ekonomi, dan sosial budaya. Perdamaian sesudah konflik di Halmahera Utara menyisahkan persoalan tersendiri bagi masyarakat dalam komunitas Kristen dan komunitas Islam. Sebagai sebuah persekutuan yang dibangun dalam ikatan kekerabatan dan keyakinan terhadap kuatnya ikatan yang melampaui sekat agama yang di anut, konflik yang telah terjadi memberikan bukti tertentu bahwa ikatan kekerabatan tersebut tidak cukup kuat dalam mengatasi perbedaan yang disebabkan oleh agama yang dianut oleh masyarakat.

Kata kunci: identitas agama, masyarakat adat, konflik Halmahera Utara

PENDAHULUAN

Tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang hubungan yang terjadi sesudah konflik berdarah di Halmahera Utara dan bagaimana identitas agama dan suku masyarakat pasca konflik di Halmahera Utara dalam perspektif multikulturalisme serta dampaknya dalam membangun nilai hidup bersama masyarakat adat Hibualamo.

Konflik yang terjadi pada kurun waktu 1999 – 2002 merupakan sebuah konflik komunal yang bermula pada persoalan pemekaran wilayah. Terlibatnya agama dalam konflik tersebut telah mengakibatkan eskalasi konflik meningkat dan juga memperluas wilayah konflik. Faktor pemekaran wilayah hanya merupakan sebuah pemicu dari sebuah ketegangan yang telah berlangsung sekian lama. Bagaimanapun konflik telah terjadi dan masyarakat Halmahera telah kembali hidup bersama melalui sebuah proses perdamaian¹. Selain itu, tragedi di Halmahera

¹ Ebin Danius. 2014. *Perubahan Makna dalam Relasi Kristen-Islam Di Halmahera Utara*, UNIERA

Utara juga seharusnya dijadikan sebagai catatan kritis untuk melihat masa depan negara ini karena jika konflik terus terjadi maka peluang untuk melahirkan disintegrasi bangsa semakin besar. Karna faktor yang mempengaruhi konflik sangat beragam yakni menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia seperti ideologi politik, agama, ekonomi, dan sosial budaya.

Perdamaian sesudah konflik di Halmahera Utara menyisahkan persoalan tersendiri bagi masyarakat dalam komunitas Kristen dan komunitas Islam. Sebagai sebuah persekutuan yang dibangun dalam ikatan kekerabatan dan keyakinan terhadap kuatnya ikatan yang melampaui sekat agama yang di anut, konflik yang telah terjadi memberikan bukti tertentu bahwa ikatan kekerabatan tersebut tidak cukup kuat dalam mengatasi perbedaan yang disebabkan oleh agama yang dianut oleh masyarakat. Ikatan persaudaraan dalam hubungan kekerabatan telah bergeser menjadi hubungan persaudaraan se-agama yang mengakibatkan mudahnya masyarakat dibenturkan dalam keyakinan keagamaan mereka.

Di Halmahera Utara khususnya wilayah Tobelo yang justru merupakan tempat peradaban suku-suku setempat bermula dan berada di bawah payung adat "Hibualamo" sebagai komunitas masyarakat adat yang sangat menjunjung nilai-nilai kekeluargaan dengan slogan "*ngone oria dodoto*" yang berarti kita semua bersaudara, justru menjadi titik rawan konflik. Akan tetapi penyelesaian konflik yang relatif singkat jika dibandingkan dengan konflik serupa di Maluku (Ambon) adalah hal menarik yang patut dicermati. Hal tersebut tidak luput dari peran lembaga adat sebagai wadah pemersatu dalam mengupayakan rekonsiliasi antar kedua belah pihak yang bertikai.

Proses penyelesaian konflik di Halmahera Utara dapat terwujud melalui keterlibatan aktif masyarakat dan tokoh-tokoh adat yang sama-sama menyadari bahwa mereka hanyalah korban kepentingan politik kelompok tertentu yang memanfaatkan isu-isu agama yang sedang marak saat itu. Salah satu upaya yang dilakukan dalam proses rekonsiliasi adalah dengan melihat kembali nilai-nilai adat Hibualamo. Hal ini terbukti memberikan kontribusi besar bagi terwujudnya rekonsiliasi diantara kedua pihak yang bertikai. Identitas adat masyarakat Hibualamo kembali mendapat tempat dalam kehidupan masyarakat Halmahera Utara. "*Ngone oria dodoto*" (bahasa Tobelo) dan "*ngone oria de ogia nongoru*" (bahasa Galela) yang berarti kita semua bersaudara kembali ditempatkan sebagai lambang kerukunan dan persatuan masyarakat.

Pendekatan kekeluargaan dan kesukuan yang coba dibangun kembali dengan proses identifikasi diri sebagai masyarakat yang disatukan dengan pola budaya yang sama tidak serta merta membuat hubungan tersebut berhasil. Berbagai isu dan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari memperlihatkan bahwa rasa percaya dari masing-masing komunitas terhadap komunitas lain belum dapat sepenuhnya pulih. Dengan latar belakang hubungan yang telah merenggang maka tentunya untuk berharap banyak dari proses pemulihan hubungan yang terjadi dimasyarakat tidaklah mungkin. Untuk itu diperlukan suatu upaya yang cukup serius dalam memahami pola hubungan yang terjadi sesudah konflik terjadi.

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi pertanyaan riset makalah ini adalah *Bagaimana karakteristik Identitas Agama dan Suku Masyarakat Halmahera pasca konflik dalam prespektif multikulturalisme di Indonesia?*

KERANGKA PEMIKIRAN

Ikatan primordial pada dasarnya berakar pada identitas dasar yang dimiliki oleh para anggota suatu kelompok etnis, seperti tubuh, nama, bahasa, agama atau kepercayaan, sejarah dan asal-usul². Identitas dasar ini merupakan sumber acuan bagi para anggota suatu kelompok etnik dalam melakukan interaksi sosialnya. Oleh karena itu, identitas dasar merupakan suatu acuan yang sangat mendasar dan bersifat umum, serta menjadi kerangka dasar bagi perwujudan suatu kelompok etnik.

Identitas dasar diperoleh secara askriptif dan tidak mudah untuk mengingkarinya, identitas dasar muncul dalam interaksi sosial antar kelompok etnik. Dalam interaksi tersebut para pelaku dari berbagai kelompok etnik akan menyadari bahwa terdapat perbedaan kelompok di antara mereka. Identitas dasar kemudian menjadi suatu pembeda antara berbagai kelompok etnik yang sedang berinteraksi. Identitas dasar merupakan sumber adanya ikatan primordial, suatu ikatan yang lahir dari hubungan-hubungan keluarga atau hubungan darah (garis keturunan), hubungan ras, lingkungan kepercayaan atau keagamaan, serta bahasa atau dialek tertentu. Suatu persamaan hubungan darah, dialek, ras, kebiasaan dan sebagainya yang melahirkan ikatan emosional³ yang kadang kadarnya berlebihan sehingga dapat menjadi sesuatu yang bersifat

² Harold R. Issacs. 1993. *Pemujaan Terhadap Kelompok Etnik (terjemahan)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hal.48-58

³ Clifford Greetz. 1992. *Politik Kebudayaan (terjemahan)*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, hal.3

destruktif. Ikatan-ikatan tersebut dianggap Greetz sebagai “warisan” dari sifat sosial yang telah ada suatu “kelangsungan yang berkesinambungan” dan sebagian besar merupakan ikatan keluarga, namun lebih dari itu merupakan warisan yang berasal dari kelahiran di tengah-tengah masyarakat beragama tertentu, yang berbicara dalam dialek bahasa tertentu, dan mengikuti praktik-praktik sosial tertentu⁴.

Dalam kehidupan sehari-hari identitas dasar suatu kelompok etnik seringkali dimanipulasi⁵. Identitas dasar dapat dinon-aktifkan, diaktifkan, dipersempit dapat dimungkinkan karena identitas dasar itu bukanlah sesuatu yang masih seperti batu melainkan cair, sehingga dapat mengalir dan berkembang dalam rangka penyesuaian-penyesuaian dalam kehidupan. Namun tidak jarang aliran identitas dasar menerjang dengan kuat bagaikan air bah yang membobol bendungan-bendungan, serta merusak segala sesuatu yang dilaluinya. Pada keadaan-keadaan tertentu identitas dasar yang mewujudkan keberadaannya dalam bentuk ikatan-ikatan primordial melahirkan kohesi emosional yang sangat kuat atau menjadi etnosentrisme yang berlebihan, sehingga menjadi sumber malapetaka.

Bhikhu Parekh (1997) dalam kajiannya tentang keberagaman budaya dan teori sosial membedakan lima model multikulturalisme:

1. *Multikulturalisme isolasionis*, yaitu masyarakat yang berbagai kelompok kulturalnya menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi minimal satu sama lain.
2. *Multikulturalisme akomodatif*, yaitu masyarakat yang memiliki kultur dominan yang membuat penyesuaian dan akomodasi-akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultur kaum minoritas. Masyarakat ini merumuskan dan menerapkan undang-undang, hukum, dan ketentuan-ketentuan yang sensitif secara kultural, dan memberikan kebebasan kepada kaum minoritas untuk mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan mereka. Begitupun sebaliknya, kaum minoritas tidak menantang kultur dominan. Multikulturalisme ini diterapkan di beberapa negara Eropa.
3. *Multikulturalisme otonomis*, yaitu masyarakat plural yang kelompok-kelompok kultural utamanya berusaha mewujudkan kesetaraan (*equality*) dengan budaya dominan dan

⁴ Harold R. Issacs, Op.cit. hal.45

⁵A.Y.Cohen. 1970. *The Social Science and The Comparative Study of Education Systems*. Pennsylvania: International Textbook Company

menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif bisa diterima. Perhatian pokok kultural ini adalah untuk mempertahankan cara hidup mereka, yang memiliki hak yang sama dengan kelompok dominan; mereka menantang kelompok dominan dan berusaha menciptakan suatu masyarakat yang semua kelompoknya bisa eksis sebagai mitra sejajar.

4. *Multikulturalisme kritikal/interaktif*, yakni masyarakat plural yang kelompok-kelompok kulturalnya tidak terlalu terfokus (*concerned*) dengan kehidupan kultural otonom, tetapi lebih membentuk penciptaan kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perspektif-perspektif khas mereka.
5. *Multikulturalisme kosmopolitan*, yaitu masyarakat plural yang berusaha menghapus batas-batas kultural sama sekali untuk menciptakan sebuah masyarakat tempat setiap individu tidak lagi terikat kepada budaya tertentu, sebaliknya secara bebas terlibat dalam percobaan-percobaan interkultural dan sekaligus mengembangkan kehidupan kultural masing-masing.

Bikhu Parekh juga mengemukakan diskursus tentang multikulturalisme mencakup dalam tiga wilayah sebagai berikut (Parekh, 2000) :

1. Kelompok masyarakat yang memiliki sistem nilai dan praktek-praktek tradisi yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Mereka hidup di tengah masyarakat umum dan tradisi dominan, tetapi sekaligus hendak menciptakan ruang bagi tradisi yang mereka yakini dan sistem nilai yang dianut. Mereka tidak hendak mendesak tradisi dan sistem nilai yang dianut, tetapi menghendaki adanya penghargaan dan pemberian ruang untuk mengekspresikan tradisi dan sistem nilai yang dianut. Kelompok ini misalnya : kelompok gay, lesbian, *single parent*, dan anak jalanan. Kelompok masyarakat seperti itu oleh Bhiku Parekh, disebut dengan *subculture diversity*.
2. Kelompok masyarakat yang kritis dengan budaya dominan (utama) dan berusaha untuk merebut serta merubah dan membentuk kembali seperti cara pandang yang mereka inginkan. Kelompok ini misalnya: kaum feminis (kritis-radikal), aktivis lingkungan radikal, kaum fundamentalis-radikal agama yang menolak sekularisasi dan sekularisme,

aktivis pendidikan alternatif-partisipatoris. Kelompok masyarakat ini disebut dengan *perspective diversity*.

3. Kelompok masyarakat yang memiliki sistem nilai sebagai cara pandang dan praktek hidupnya sendiri. Mereka ini terorganisir dengan baik dalam masyarakatnya. Misalnya masyarakat pendatang/imigran, kelompok agama suku, suku-suku asli, kelompok masyarakat di daerah-daerah (teritori) tertentu seperti suku Badui, Samin, dan seterusnya. Mereka disebut dengan *communal diversity*.

Identitas agama dalam konflik yang terjadi telah menjadikan agama sebagai sebuah identitas pembeda yang dianggap tidak dapat mempertemukan masyarakat dari dua komunitas yang saling berhadapan selama konflik terjadi. Dari sejak proses perjumpaan dalam upaya rekonsiliasi, tema-tema percakapan yang dihadirkan oleh masing-masing komunitas adalah pada warisan budaya bersama yang diterima dari para leluhur masyarakat Halmahera Utara. Warisan tersebut menyangkut pola hidup bersama yang tidak memandang keyakinan agama yang dianut oleh masyarakat.

Pendekatan utama yang dikembangkan dalam menjalin relasi kembali adalah dengan berupaya menghadirkan kembali semangat kekeluargaan. Semangat kekeluargaan tersebut dibangun berdasarkan pemahaman tentang asal-usul pembentukan desa yang terbentuk melalui kelompok-kelompok masyarakat yang terikat dalam hubungan keluarga melalui proses pernikahan antar keluarga. Dengan pola pembentukan yang demikian maka dapat dipastikan bahwa penduduk dari sebuah desa akan selalu memiliki hubungan kekeluargaan dengan penduduk desa lainnya. Pemahaman yang dibangun dalam pendekatan kekeluargaan dengan kenyataan di atas juga hendak merujuk pada kesatuan budaya dalam masyarakat. Bahwa ikatan kekeluargaan dan kesatuan budaya menjadi hal penting yang dianggap dapat melampaui perbedaan agama dari setiap anggota masyarakat. Dalam hal ini upaya yang dilakukan adalah dengan mencoba untuk kembali pada nilai - nilai dasar yang pernah hidup dalam masyarakat Halmahera Utara.

Pendekatan kekeluargaan yang dibangun berangkat dari pemahaman tertentu mengenai budaya masyarakat Halmahera Utara yang mengutamakan hubungan kekeluargaan. Clifford Geertz memahami bahwa budaya bukan hanya sebatas adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, tradisi-

tradisi dan bahasa semata. Bagi dia kebudayaan adalah sebuah sistem kontrol terhadap tingkah laku manusia dan baginya manusia sangat tergantung dengan fungsi kontrol tersebut. Dalam fungsi kontrol yang demikian maka manusia hidup dalam simbol-simbol yang diberi makna dan status tertentu yang bernilai tertentu bagi kehidupan manusia. Nilai-nilai yang disepakati bersama itulah yang memungkinkan manusia untuk mengontrol semua tindakannya dalam interaksi dengan sesama manusia. Karena pada dasarnya menurut Geertz manusia adalah makhluk yang tidak dapat mengontrol tindakan yang dilakukannya dan karena itu hakikat dari kebudayaan adalah kumpulan dari totalitas nilai yang disepakati bersama.

Geertz juga melihat bahwa munculnya sebuah kebudayaan adalah sebagai suatu respon dari manusia terhadap lingkungan dimana dia berada. Pandangan yang demikian merupakan bentuk penolakan dari Geertz terhadap teori munculnya kebudayaan dari faktor genetis. Menurutnya semua pola dan tindakan manusia adalah bagian dari adaptasi terhadap tekanan lingkungan yang dialami oleh manusia dan cara adaptasi tersebut diteruskan kepada generasi selanjutnya yang kemudian berkembang menjadi sebuah sistem nilai dalam kehidupan manusia.

Dari apa yang diungkapkan oleh Geertz kita dapat memahami bahwa kebudayaan merupakan segala sesuatu yang terkait dengan kehidupan manusia. Ia menyangkut sebuah sistem nilai yang diterima dan disepakati secara bersama oleh setiap anggotanya dan merupakan respon terhadap lingkungan dimana dia berada. Pemahaman kebudayaan yang demikian hidup dalam masyarakat yang homogen baik dari segi etnis maupun dalam keyakinan. Masyarakat tradisional Halmahera Utara yang belum mengalami persentuhan dengan agama lain dan orang luar dapat menerima bahwa ada sistem nilai tunggal yang hidup dalam masyarakat. Sistem nilai tersebut mengatur pola hubungan mereka dan menjadikan sistem tersebut sebagai satu-satunya patokan terhadap tingkah laku masyarakat. Dalam hal ini sistem nilai tersebut menjadi panduan umum dalam tingkah laku masyarakat.

Dari uraian di atas kita dapat mengerti bahwa kebudayaan merupakan sebuah hasil duplikasi yang secara terus menerus diturunkan kepada generasi selanjutnya dan diberikan nilai baru oleh generasi dibawahnya. Dalam kondisi yang demikian maka pengalaman menjadi hal penting untuk membangun sistem nilai sosial baru pada proses interaksi antar masyarakat. Dengan pemahaman yang demikian merenggangnya hubungan antar warga masyarakat dapat dipahami sebagai sebuah proses pemberian makna baru dari generasi baru sesuai dengan

tantangan hidup yang dihadapinya. Dengan kondisi tersebut maka kebudayaan yang selalu berubah menghasilkan pola hubungan baru yang sama sekali berbeda dengan generasi sebelumnya.

Dengan demikian menjadi jelas bahwa nilai kekeluargaan yang coba dibangun kembali oleh masyarakat Halmahera Utara untuk merekatkan hubungan kembali antar komunitas agama telah juga mengalami perubahan makna seiring dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Masyarakat Halmahera Utara dalam hal ini kurang menyadari perubahan tersebut dan tetap hidup dalam romantisme masa lalu yang telah kehilangan makna. Bahwa ternyata sesudah konflik yang terjadi upaya ini lebih sulit karena dari kedua belah pihak telah sama-sama merasakan ikatan tersebut tidak cukup kokoh untuk mempersatukan kembali mereka. Hal ini nyata melalui pola hubungan yang terjadi dimana isu-isu tertentu dalam nuansa keagamaan ditanggapi dengan berpihak pada keyakinan agama yang mereka anut saat ini. Selain itu interaksi langsung yang penuh kecurigaan menjadi hal penting yang memperlihatkan bahwa hubungan kekeluargaan tersebut tidak sepenuhnya berhasil.

Perkembangan yang terjadi dalam masyarakat berdampak pada berubahnya nilai kekeluargaan dalam kehidupan masyarakat. Keluarga yang dulunya dipahami secara umum untuk menyebutkan semua anggota kelompok yang berasal dari satu klan menyempit menjadi hanya keluarga inti. Dan dalam perkembangannya justru juga hanya dipahami dalam hubungan yang berdasar pada satu keyakinan agama. Upaya mendekatkan kembali ikatan kekeluargaan setelah konflik jelas membutuhkan pemaknaan kembali. Seperti yang diungkapkan oleh Geertz bahwa untuk menegakkan kembali nilai-nilai bersama dalam kehidupan masyarakat dibutuhkan kesepakatan-kesepakatan kembali terhadap makna sesuatu. Percakapan seperti inilah yang tidak dilakukan ketika kedua komunitas sepakat untuk mengembalikan nilai kekeluargaan sebagai dasar dari hubungan antar komunitas agama. Akibatnya jelas bahwa tidak ada dasar yang cukup kokoh untuk menjembatani pemahaman dari kedua belah pihak dan dengan demikian juga tidak ada kesepakatan bersama.

Dengan semua uraian di atas maka kita dapat memahami bahwa upaya merekatkan kembali hubungan antar komunitas Kristen dan Islam berdasarkan nilai kekeluargaan yang berakar pada budaya masyarakat asli Halmahera Utara jelas tidak sepenuhnya akan menghasilkan sesuatu yang memuaskan. Dari sini juga kita dapat memahami bahwa ketegangan

yang terjadi terus menerus dalam kehidupan masyarakat tetap akan terjadi selama tidak adanya upaya untuk menyatukan persepsi bersama tentang nilai kekeluargaan yang dikedepankan dalam hubungan tersebut.

KONFLIK HALMAHERA UTARA

Jika kita menyelusuri akar sejarah tentang awal-mula terjadinya konflik di Halماهhera Utara, maka berawal di era Lodewijk de Bortomo tercatat sebagai pelaut Portugis pertama yang tiba di Maluku Utara pada 1506 yang disusul kemudian oleh Fransisco Serrao yang tercatat sebagai orang Eropa pertama yang menetap di Ternate. Konflik awal ini kita lihat pada pertempuran di jazirah Leihitu, Ambon yang melibatkan pasukan kerajaan Gowa dan Ternate yang Islam melawan pasukan Portugis yang Katolik dengan dibantu oleh penduduk Ambon yang Kristen adalah catatan konflik kolonial pertama di bumi Nusantara. Konflik ini pun berlanjut hingga datangnya bangsa Belanda. Pertempuran Kapaha- Ambon misalnya adalah catatan buruk bagi reputasi pasukan VOC di Indonesia. Dalam konteks historis inilah kemudian konflik yang terjadi di Maluku Utara saat ini tidak terlepas dengan pengaruh hegemoni bangsa asing yang telah terbangun ribuan tahun silam.

Sebagai sebuah ilustrasi singkat ketika reformasi bergulir 1998, peta politik skala nasional berubah secara dratis dan hal ini mempengaruhi kondisi politik di daerah, khususnya Maluku Utara. Perubahan politik ini kemudian melahirkan kepentingan dikalangan elit lokal untuk menduduki posisi formal di daerah dengan menyuarakan pembentukan propinsi Maluku Utara. Perubahan politik yang tidak dibaringi dengan kesiapan mental masyarakat untuk berpolitik kemudian melahirkan perpecahan akibat perbedaan kepentingan tersebut. Namun dari beberapa isu di atas jika dijadikan sebagai isu utama maka kita kehilangan jejak dalam melacak akar konflik tersebut, sehingga dengan tulisan ini penulis berusaha untuk mencari faktor utama tragedi berdarah tersebut dengan paradigma sejarah sebagai pisau analisis.

Dalam prespektif sejarah dan cerita-cerita rakyat tradisional tercatat bahwa sultan yang memerintah keempat kerajaan di Maluku Utara berasal dari satu keturunan yaitu Djafar Sedik. Namun bukan berarti, dengan satu keturunan maka tercipta keharmonisan diantara keempat kesultanan tersebut. Hal ini bisa direkam dalam sejarah bahwa dimasa Kolano Cico atau Mashur Malamo (1257) usai era Momole, sudah ada perseturuan laten antar klen raja baik di internal

kerajaan maupun antar kerajaan. Hal ini di akui juga oleh Niadah yakni juru tulis kesultanan Ternate juga sudah mengungkapkan benih-benih perpecahan itu. Konflik tersebut terus berlanjut hingga dimasa Kolano Sidang Arif Malamo menjadi raja di Ternate (1322-1331). Beliau kemudian merumuskan satu bentuk konfederasi guna menyatukan kembali ikatan kekeluargaan diantara keempat kesultanan tersebut. Kolano Arif Malamo kemudian mengundang para Raja-Raja di Maluku Utara, minus Raja Loloda karna terlambat dan dalam konfrensi tersebut lahirlah kesepakatan untuk memperteguh persatuan keempat ke-kolano-an guna melawan serangan fisik maupun non fisik yang datang dari luar, selain itu, disepakati pula menetapkan tugas dan fungsi dari masing-masing ke-kolano-an tersebut yang dalam hal ini Jailolo diakui sebagai kerajaan pertama dari tiga kerajaan lain dalam hal senioritas. Namun kesepakatan tersebut tidak mengakhiri ambisi politik ekspansi Ternate untuk menyerang Jailolo. Penyerangan ini kemudian membatalkan seluruh kesepakatan yang telah disepakatai bersama. Namun di lain pihak persekutuan ini telah menghasilkan sesuatu yang fundamental, yakni ikatan cultural masyarakat maluku utara dan dari ikatan ini kemudian terbagun rasa persaudaraan diantara masyarakat Maluku Utara.

Bangunan kedamaian yang telah terbangun tersebut kemudian dirusak secara paksa oleh bangsa Portugis dan Spanyol yang hadir di Maluku Utara di Abad ke XVI dengan membonceng misi penyebaran agama Kresten di negeri Maluku Kie Raha. Sistim politik monopoli inilah kemudian melahirkan perlawanan dari kalangan kesultanan, namun perlawanan ini melemah akibat politik adu domba yang di lancarkan oleh bangsa Portugis. Sehingga terjadilah perpecahan ditubuh empat kesultanan. Untuk melihat kembali dalam catatan sejarah perlawanan rakyat Maluku Utara yang beragama Islam melawan bangsa Portugis yang nota bene beragama Kristen seperti dilakukan oleh Sultan Babullah dengan menyatukan seluruh kesultanan di Maluku Utara dengan semboyan “perang suci” dan inilah telah memunculkan benih-benih konflik agama.

Perlawanan yang dilakukan oleh Sultan Babullah tersebut kemudian mampu mengusir bangsa Portugis dari Ternate ketika terjadi pengepungan selama lima tahun dibenteng Nostra Senhora del Rosario. Kepergian bangsa Portugis kemudian di susul oleh Spanyol dua tahun kemudian. Namun bukan berarti telah berakhir untaian kolonialisme di bumi Maluku Kie Raha, karna setelah keluarlah Spanyol maka datanganlah Belanda pada tahun 1607 di bawah pimpinan Cornelis Matelief de Jonge sebagai sebuah babak lain dari kekuasaan Barat telah dimulai.

Belanda yang juga menyebarkan agama Kristen Protestan di seantero Maluku Utara dengan paksa, mulailah perlawanan fisik yang bukan saja untuk mempertahankan kedaulatan-kedaulatan kerajaan Islam di Maluku Utara tetapi juga mempertahankan aqidah agamanya.

Ketika anjuran Sultan Ternate agar masyarakat Tobelo meninggalkan Telaga Lina dipedalaman Halmahera Utara untuk bermukim di kawasan pesisir. Namun sebagian besar masyarakat Tobelo menolak menganut Islam karna agama nenek moyang yakni animisme telah tertanam kuat dalam keyakinan mereka, sehingga kepercayaan ini tidak bisa di gantikan dengan kepercayaan yang lain dalam waktu relatif singkat. Konflik antar agama yakni Islam dan Kristen di Halmahera Utara yakni di Tobelo terjadi pada pertengahan tahun 1536. Konflik ini berawal ketika perebutan hegemoni antara elite Ternate, Tidore, Portugis dan Jailolo. penyerangan ini berakibat pada hancurnya desa Mamuya (di tahun 1999 Mamuya juga menjadi sasaran konflik) yang menjadi sentral penyerangan, namun dengan semakin memanasnya konflik tersebut kemudian kepercayaan Masyarakat Mamuya beralih masuk kedalam Corpus Christianum sebagai umat Kristen.

Dengan masuknya komunitas Mamuya ke dalam agama Kristen maka Mamuya dalam konteks historis tercatat sebagai umat Kristen pertama di tanah Maluku Kie Raha. Perpindahan agama komunitas desa Mamuya ini tentunya menimbulkan peringatan bagi kesultanan Tidore yang bersekutu dengan Spanyol melawan kesultana Ternate –Portugal. Perpindahan agama pada waktu itu dipandang sebagai perpindahan kebangsaan sekaligus loyalitas politik. Maka, pasukan gabungan raja Katarabumi dan Tidore membakar habis desa Mamuya. Pemimpinnya yang telah mendapat gelar bangsawan Portugis Don Joao itu ditangkap dan diadili di Tidore. Kebijakan ini kemudian menyebabkan kerusuhan yang merambat ke seluruh kawasan Halmahera Utara. Dengan demikian ada keterikatan historis konflik di Halmahera Utara yang terjadi pada bulan Agustus 1999 dengan konflik pada masa kolonialisme. Konflik 1999 di Halmahera Utara, berawal dari pertikaian antara suku Kao dengan suku Makian yang mendiami tanah Malifut yang mayoritas merupakan pendatang dari Pulau Makian dan beragama Islam. Pertikaian ini berkaitan dengan berbagai faktor, yakni politik, ekonomi dan sosial budaya. Pada gelombang pertama jumlah korban jiwa dan harta benda hanya dalam hitungan puluhan. Pertikaian ini terus berlanjut akibat dari penanganan konflik yang dilakukan pemerintah tidak efektif, dimana bukan substansi permasalahan yang disentuh melainkan faktor kulitnya yang disentuh sehingga dendam akibat

dari konflik pertama tersebut menimbulkan pertikaian lanjutan pada bulan Oktober-November 1999 dan skalah kerugian harta milik dan fasilitas-fasilitas publik dan bangunan jahu melebihi kerugian yang terjadi pada bulan agustus 1999. dan yang paling ironisnya lagi pada konflik gelombang ke dua ini kurang lebih 16 desa suku Makian diratakan dengan tanah, sementara jumlah korban yang meninggal kurang 100 orang lebih dan kebanyakan dari komunitas Islam.

Untuk mereda konflik yang terjadi ketiga Sultan yang memerintah di Maluku Utara, yakni Sultan Ternate, Sulatan Tidore dan Sultan Bacan mengambil peran aktif dalam meredakan ketegangan-ketegangan antara dua komunitas yang berperang. Namun kebijakan yang dilakukan oleh ketiga Sultan tersebut bukan menyelesaikan permasalahan malah menimbulkan konflik baru yang terjadi di Ternate yang melibatkan dua kekuatan yang sama-sama beragama Islam yakni Pasukan Adat Sultan Ternate melawan Pasukan Putih dari Ternate Selatan. Aksi kekerasan kemudian terjadi lagi di daerah Tobelo dan Galela dimana pada gelombang ketiga ini serangan-serangan dilakukan secara simultan oleh kelompok kresten terhadap desa muslim di Gahoku, Tuguliwa, Gurua, Kampung Baru, Gamsungi, Lauri, dan Popilo yang berada di Kec Tobelo serta desa Mamuya di Kec Galela. Yang menimbulkan korban jiwa kurang lebih 800 orang, dimana 200 orang diantaranya meninggal karna terbakar hidup-hidup di Mesjid Baiturrachman di desa Popilo.

Konflik lanjutan terjadi pula pada tanggal 19 Juni 2000 di desa Duma Kecamatan Galela yang penyerangan dilakukan oleh mereka yang mengatasnamakan komunitas Islam terhadap masyarakat di desa Duma yang mayoritas beragama Kristen. Dalam pertikaian yang tidak seimbang ini setidaknya 215 orang meninggal dan kurang lebih 500 orang dinyatakan hilang bersamaan dengan tenggelamnya kapal Nusa Bahari yang membawa masyarakat Desa Duma untuk mengungsi.

IDENTITAS AGAMA DI HALMAHERA UTARA

1. Penyebaran Islam Di Halmahera Utara

Penyebaran Agama Islam pertama kali di Halmahera Utara dilakukan oleh kesultanan Ternate dan Tidore. Penyebaran ini dimulai ketika kepemimpinan Sultan Zainal Abidin yang telah mendalami Ilmu Islam di Sunan Ampel. Semangat Islamisasi ini kemudian dilanjutkan oleh putranya Sultan Bayanullah dengan metode penyebarannya di kalangan petinggi kesultanan

sehingga dengan mudah mereka menyebarkannya kepada masyarakat luas. Ekspansi Islam kemudian sampai ke Halmahera Utara, namun tidak ada bukti tertulis yang menggambarkan tarikh masuknya agama Islam di Halmahera Utara secara tepat dan benar. Namun bisa digambarkan bahwa para pedagang, perantau, dan nelayan di pesisir pantai Halmahera yang menganut Islam pertama yang dibawa oleh para Ulama. Hal ini akibat dari terisolasinya wilayah pedalaman dan pesisir menyebabkan proses Islamisasi terhambat, dan hingga abad ke 19 daerah pedalaman Kao, Galela, Sahu, Jailolo, dan Ibu belum tersentuh oleh Islam. Penyebaran ini kemudian terhambat dengan kedatangan bangsa Portugis, Spanyol, dan Belanda yang juga memboncengi ajaran Kristen Katolik dan Protestan. Akibat dari politik adu domba, sehingga pihak kesultanan harus mengerahkan seluruh pikiran, tenaga dan waktu guna mempertahankan eksistensi kerajaan dan ajaran Islam.

Memasuki tahun 1900-an, ada tiga tokoh penting dalam penyebaran Islam di Halmahera Utara. Ketiga tokoh tersebut adalah, Haji Abdullah Hoatseng (1874-1970) yang menjabat Imam (Distrik = Kecamatan) Tobelo, Haji Muhammad Amal (1880-1960) sebagai Imam Galela dan Haji Umar Jamaa sebagai Imam Morotai. Ketiga tokoh ini sangat berperan dalam Islamisasi di Halmahera Utara mengingat karena kondisi objektif Tobelo dimana seluruh daerah di Tobelo telah di Kristenkan oleh Zending Belanda dari Utrecht (Utrechtsche Zending Genootschap).

Hanya di Tobelo Utara komunitas Muslim masih terdapat di banyak daerah yakni di Gorua, Popilo, dan Luari itu pun campuran antara Kristen dan Islam dan itu berarti seluruh kawasan Tobelo telah di Kristenkan. Namun hal ini tidak membuat Imam Haji Abdullah berkecil hati, terbukti setelah berusaha selama 20 tahun untuk mengislamkan komunitas campuran terjadi perubahan yang signifikan yakni Gamsumi, Gorua, Tolonuo, Luari dan Popilo berubah menjadi Mayoritas Islam. Selain itu Gamhoku, Imam berhasil membendung ekspansi Kristen sehingga sektor ekonomi dikuasai oleh kaum Muslim.

Memasuki tahun 1934, kesepakatan antara ketiga Imam tersebut untuk mendirikan lembaga pendidikan sebagai wadah dakwah yang ideal, yang pada tahun 1938 mereka mendirikan Muhammadiyah. Program penyebaran Islam oleh Imam di Tobelo terhadap komunitas campuran mendapat protes dari Zending. Zending mengirimkan protes kepada Sultan Ternate yakni Sultan Jabir Syah untuk menghentikan cara-cara penyebaran agama oleh Imam, dan pada tahun 1929 Imam pernah di panggil Sultan untuk klarifikasi protes Zending, setelah

mendengar alasan-alasan Imam, Sultan dapat membenarkan tindakanya . Islamisasi di Galela berjalan mulus akibat dari penguasaan lahan oleh Zending hanya 2 kampung yakni Duma dan Soatabaru secara penuh. Sedangkan yang lainnya Zending hanya menguasai seperdua (Soakonora, Mamuya, Seki dan Bale). Penyebaran Islam yang dilakukan oleh Imam sangat metodis yakni dengan cara Dakwah yang khas, selain secara verbal juga dengan seni membaca Al-Qur'an, seni suara hadrat bahkan dengan sandiwara.

Sejak Imam memegang kendali di Galela, misi Zending memperoleh kendala yang ketat dan gerak majunya terhenti, walaupun zending di pimpin oleh pendeta-pendeta yang cakap seperti Van Baarda yang telah bermukim di Galela selama 32 tahun. Namun berbeda dengan perkembangan Islam di Morotai yang dilakukan oleh Imam Haji Umar Jamaa sedikit menemui kendala ini dikarenakan daerah Morotai yang sangat luas dengan keadaan geografis yang sangat sulit untuk musim-musim angin tertentu, selain itu Zending Tobelo dan Galela telah mendirikan pos-pos penyebaran Injil di Tanjung wilayah Morotai seperti Daeo, Sambiki, Sangowo dan Buso-Buso. Hal ini membuat seluruh tenaga terkuras untuk menghadapi penyebaran Injil yang dilakukan oleh Zending, namun karna selalu sabar dan didukung oleh para tokoh-tokoh Islam lainnya, maka daerah Morotai menjadi mayoritas beragama Islam.

2. Penyebaran Kristen di Halmahera Utara

Masuknya agama Kristen di Halmahera Utara diawali sejak masuknya Portugis. Pada tahun 1536, Antonio Calvao menjadi walinegeri ke-7 di Ternate, ia mengirim Pastor Ferdinand Vinogre ke Mamuya. Upaya ini tidak berhasil. Konon kegagalan Vinogre selain dimusuhi rakyat, juga karna tekanan dari Sultan Jailolo. Karna berbagai kegagalan dalam Kristenisasi maka Raja Muda Portugis di Goa pada tahun 1542 mendatangkan Franciscus Xaverius seorang misionaris yang sangat jenius. Dengan metode penyebaran di kalangan elit, ia berhasil mempengaruhi istri Sultan Bayanullah yang telah pisah yakni Nyai Tsyili. Setelah beberapa lama di Ternate, Xaverius melakukan perjalanan mengilingi Halmahera Utara (Morotia dan Morotai) praktis tidak membawa hasil yang memadai. Namun dengan politik pecah bela (*divide et impera*), kerajaan kecil menjadi sasaran gerakan tersebut dengan tujuan melemahkan kerajaan besar seperti Ternate dan Tidore. Raja Mamuya dari kerajaan kecil Morotia misalnya, dilindungi dari ancaman Kerajaan Ternate asalkan ia mau masuk Kristen. Akhirnya sang Raja tersebut beralih menganut

agama Kristen demi keselamatannya. Proses penyebaran ini terus berlanjut hingga pengusiran Portugis oleh Babullah dan kedatangan Belanda. Pada tahun 1866, tiba di Galela dan Tobelo pendeta-pendeta dari Perhimpunan Zending Utrecht (Utrechtshe Zending Genootschap (UZG)) di bawah pimpinan H.H. Bode dan Van Dijken. Mereka menetapkan Galela sebagai pusat Kristenisasi dan membangun pos-pos oprasionalnya di tempat yang dianggap penting di Halmahera Utara.

Berdasarkan bahan-bahan publikasi dan laporan-laporan pemerintah, UZG sudah mengetahui bahwa didaerah-daerah pesisir Halmahera Utara yang mereka bidik, sudah merupakan komunitas Islam. Lima tahun pertama, hasil Zending nol besar hingga kedatangan Van Baarda dalam tahun-tahun tugasnya, ia mampu menggarap kampung-kampung disekitarnya. Seperti Dokumalamo dan Soatobaru mulai di Kristenkan. Dalam tahun 1905, mereka mulai membentuk pos-pos guna mengorganisir dengan cepat. Suatu hal yang sangat mencolok dari penempatan Pos-pos ialah bahwa semuanya dilakukan pada kampung-kampung yang sebagian besar penduduknya telah memeluk Islam sehingga terjadi semacam perebutan anggota jamaah antara kedua agama tersebut.

Walaupun dengan semangat yang luar biasa, untuk menyebarkan Kristen di bumi Halmahera namun hasilnya tidak maksimal, ini diakibatkan ada kendala tiga pemimpin Islam yang tangguh di saat itu. Di Galela, Imam Haji Muhammad Amal, di Morotai Imam Haji Umar Djamaa, dan di Tobelo Haji Abdullah Hoatseng. Ketiga tokoh ini mampu menghalangi laju penyebaran Kristen dan dengan organisasi Muhammadiyah yang getol dengan dakwahnya cukup memberikan kontribusi dalam upaya menghambat Kristenisasi di Halmahera Utara. Tahun 1942, Jepang mulai mendarat di Indonesia para Evangelis Belanda dari UZG itu menjadi tawanan perang, dan sejak itu pula UZG menghentikan kegiatannya. Tugas mereka seluruhnya diambil alih oleh GMIH (Gereja Masehi Injili Halmahera) yang berpusat di Tobelo yang merupakan wadah tunggal Kristen di Halmahera Utara, khususnya di Galela dan Tobelo.

3. Perubahan Agama : Masuknya Sistem Budaya Baru

Satu hal yang juga mempersatukan masyarakat adalah sistem kepercayaan yang hidup dalam masyarakat. Menurut A. N. Aesh masyarakat tradisional Halmahera tidak memisahkan antara yang sakral dengan yang profan. Keyakinan keagamaan masyarakat ditunjukkan dalam

kehidupan setiap hari melalui sikap dan tindakan dalam kehidupan masyarakat⁶. Robert N. Bellah melihat hal yang sama bahwa organisasi keagamaan pada masyarakat tradisional dilihat dalam kesatuan dengan seluruh sistem sosial yang ada dalam sebuah masyarakat. Dengan tidak terpisahnya hal ini maka menurutnya hal tersebut mendorong terwujudnya solidaritas masyarakat yang pada gilirannya mendorong masyarakat untuk mengikuti dan mentaati norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

Nilai keagamaan seperti yang dijelaskan di atas menempatkan agama asli masyarakat sebagai sesuatu yang mengatur pola hidup dan tingkah laku mereka dalam interaksi dengan lingkungan sekitar termasuk sesama anggota kelompok. Pemahaman seperti ini membawa kita untuk memahami bahwa agama asli juga terkait dengan kebudayaan masyarakat. Artinya ialah agama dan budaya bukanlah sesuatu yang terpisah dan dalam kenyataan seperti ini agama asli harus dipahami sebagai salah satu produk budaya. Sebagai produk budaya maka agama asli juga merupakan sebuah respon terhadap lingkungan dimana masyarakat itu hidup.

Masyarakat tradisional Halut meyakini adanya Tuhan yang maha tinggi yang disebut *Jou Ma Dutu* (*Jou* = tuan/Tuhan *ma dutu* = yang benar/yang asli dan menjadi pemilik)⁷. Menurut James Haire Tuhan tersebut diakui keberadaannya sebagai pemersatu dan pemilik dunia namun tidak mengambil tempat yang penting dalam aktifitas ritual dan hidup setiap hari dari masyarakat. Peran penting dalam kehidupan ritual harian dan dalam kehidupan setiap hari terletak pada konsep mereka tentang *Gomanga*. *Gomanga* dipahami sebagai roh-roh yang berasal dari para tokoh-tokoh masyarakat yang luar biasa yang oleh keturunannya dijadikan objek penyembahan. Para tokoh ini dianggap mewariskan sesuatu yang memiliki makna penting dalam kehidupan masyarakat yang ditinggalkannya dan menjadi patokan serta nilai hidup bersama dalam masyarakat. Dengan pemahaman yang demikian masyarakat disatukan bukan saja oleh nilai yang diwariskan tetapi juga pada pemahaman bahwa apa yang mereka sembah tersebut merupakan leluhur mereka. Disinilah nilai yang menyatukan kehidupan masyarakat secara bersama.

Nilai keyakinan dalam sistem kepercayaan juga adalah adanya roh-roh yang hidup disekitar manusia. Roh dalam pandangan masyarakat adalah jiwa dari orang-orang yang telah

⁶ Ebin Danius. 2014. *Perubahan Makna dalam Relasi Kristen-Islam Di Halmahera Utara*, UNIERA

⁷ *Ibid*

meninggal dan disebut *Gikiri*. Ada dua jenis *gikiri* yaitu *gikiri moi* dan *gikiri mandorou*⁸. *Gikiri Moi* merupakan roh baik yang menolong manusia sedangkan yang satunya merupakan roh jahat yang mengganggu manusia. Pemahaman yang dibangun demikian memperlihatkan bahwa ada kehidupan sesudah kematian namun kehidupan itu bukanlah sesuatu yang jauh dan berada diluar kehidupan manusia. Kehidupan itu ada dan akan terus ada dalam kaitan dengan manusia yang masih hidup.

Keyakinan masyarakat asli jelas berbeda dengan nilai keyakinan yang pada agama Kristen dan agama Islam. Dalam keyakinan kedua agama tersebut kehidupan dunia ini merupakan kehidupan yang sementara sifatnya dan dunia ini suatu saat akan berakhir. Kehidupan dalam keyakinan yang demikian dilihat sebagai sebuah garis lurus yang suatu saat akan berakhir, dimana ketika semua ini berakhir ada kehidupan lain yaitu surga dan neraka. Konsep imbalan pada kehidupan akhir membuat orientasi dari kedua agama tersebut pada tindakan individu untuk memperoleh sesuatu kelak. Upaya memperoleh sesuatu tersebut menjadikan perjuangan agama hanya sebatas perjuangan individu. Walaupun penekanan agama pada kolektivitas namun nilai keselamatan terletak pada pribadi masing-masing membuat relasi yang diutamakan adalah pada relasi dengan Tuhan yang dianggap akan memberikan ganjaran surga kepada manusia yang melakukan kebaikan.

Dari sini menjadi jelas bahwa keyakinan masyarakat asli terletak pada kolektivitas hidup bersama dimana tindakan mereka sehari-hari disatukan oleh sistem budaya dan sistem keyakinan mereka. Bahwa kehidupan yang terjadi saat ini memiliki hubungan yang erat dengan kehidupan nanti yang dilihat sebagai sesuatu yang tidak jauh dari kehidupan mereka saat ini. Keyakinan yang demikian menghantarkan mereka untuk menjaga relasi mereka dengan lingkungan dan relasi mereka dengan sesama anggota kelompok.

Masuknya agama-agama lain khususnya Kristen dan Islam dalam kehidupan masyarakat Halut membuat terjadinya perubahan keyakinan yang berdampak pada beragamnya sistem nilai sesuai dengan keyakinan agama yang masuk tersebut. Sistem keyakinan yang berbeda tersebut berdampak pada hilangnya keyakinan masyarakat terhadap nilai keagamaan asli yang selama ini mereka pegang secara bersama. Dengan kondisi yang demikian maka merenggangnya hubungan

⁸ *Ibid*

antar masyarakat dapat dipahami sebagai bagian dari hilangnya nilai yang mempersatukan masyarakat. Dalam hal ini latar belakang kekeluargaan dan kesukuan yang sama bukanlah jaminan dalam membangun relasi Kristen – Islam. Merasa sebagai orang yang berasal dari keturunan yang sama tidak serta merta menghasilkan sebuah pandangan yang sama. Karena hal penting dalam proses ini adalah pengaruh kebudayaan dalam menilai lingkungan dimana dia berada.

Perbedaan nilai keagamaan yang bersumber pada klaim tertentu yang ada pada agama menyangkut konsep-konsep tertentu dalam ajaran-ajaran agama menghasilkan kompetisi pada agama-agama yang berujung pada konflik. Konflik yang terjadi tidak saja dipahami sebagai sebuah konflik fisik semata namun juga terkait dengan perebutan pengaruh dalam kehidupan masyarakat.

AGAMA DAN BUDAYA: SEBUAH KEMUNGKINAN MEMBANGUN NILAI HIDUP BERSAMA

Dari uraian di atas kita dapat memahami dua hal penting yaitu pertama, masyarakat Halmahera Utara perlu secara kritis memahami bahwa perubahan yang terjadi telah juga berdampak pada perubahan makna dalam relasi hidup yang didasarkan pada ikatan tertentu. Sikap kritis bukan dimaksudkan untuk menolak kebenaran yang mungkin terkandung dalam nilai kekerabatan tersebut. Namun sikap kritis dimaksudkan adalah bahwa masyarakat tidak hanyut dalam romantisme masa lalu dan mengandaikan hal tersebut dapat diberlakukan pada masa sekarang. Dengan sikap yang demikian maka masyarakat akan sadar bahwa perlu sebuah upaya memaknai kembali relasi tersebut dalam situasi yang terjadi saat ini. Kedua, agama-agama yang kemudian masuk dalam kehidupan masyarakat telah menjadi faktor utama terjadinya pergeseran nilai hidup dalam masyarakat. Penerimaan agama telah membuat berubahnya sistem nilai kepercayaan dari kesadaran kolektif menjadi kesadaran pribadi. Dengan pola keyakinan yang berubah ini agama dilihat hanya dalam relasi antara Tuhan dan manusia secara pribadi dan bukan pada kelompok. Kesadaran komunal yang ditunjukkan oleh agama-agama baru hanya merupakan sebuah ritual bersama dimana pemeluk agama dalam kebersamaan justru menghayati kehadiran Tuhan secara pribadi. Ritual dalam hal ini hanya merupakan wujud dari sebuah upaya untuk menyatukan pemeluk satu agama dalam sebuah kesadaran bersama sebagai satu komunitas.

Padahal sebagaimana telah diungkapkan pada bagian sebelumnya, bagi orang Halmahera agama bukanlah sesuatu yang pribadi sifatnya dan juga bukan sebuah entitas terpisah dari hidup harian. Agama dalam penghayatan orang Halmahera adalah gerak hidup yang berjalan dalam kesadaran harian baik secara pribadi maupun kelompok. Dengan anggapan yang demikian maka agama juga adalah budaya dan budaya adalah agama.

Memisahkan budaya dengan agama hanya mengakibatkan masyarakat mengalami split personality yang disatu sisi menjalani hidup dalam nilai budaya namun pada sisi yang lain menjalankan juga nilai hidup yang didasarkan pada agama yang dianut. Hal yang demikian dapat dengan jelas terlihat sehari-hari dimana dalam kesadaran tertentu masyarakat masih menerima dan mempraktekan nilai hidup berdasarkan budaya dengan tidak mempertentangkannya dengan agama yang dianut seperti seperti menyimpan air bekas baptisan, percaya tentang pertanda khusus yang ditunjukkan oleh binatang tertentu dan banyak sekali contoh yang lain.

Namun karena kuatnya pemaknaan kebenaran pada agama, masyarakat Halmahera yang sangat terikat dengan lingkungan alamnya memaksakan diri untuk merasionalkan banyak hal sesuai dengan pengajaran agama yang dianggap rasional. Lihatlah bagaimana tuduhan terhadap orang yang berupaya memelihara budaya dianggap sebagai pemuja setan. Tentunya pandangan yang demikian lahir dari kebingungan dan wujud dari penolakan kehadiran Tuhan dalam hidup. Seolah semua yang berasal dari luar adalah benar dan melampaui kebenaran yang ada dalam nilai hidup masyarakat lokal. Menjadi penting dalam sudut pandang saya adalah membahasakan kembali agama asing dalam budaya masyarakat Halmahera. Kita tentunya tidak bisa lagi berdebat dimana posisi agama dalam kebudayaan. Agama yang berarti bagi hidup manusia seharusnya agama yang memahami dan berada dalam situasi hidup pemeluknya. Hanya dengan mengembangkan keyakinan yang demikian masyarakat Halmahera bisa menerima agama dan sekaligus bisa menerima budaya.

Memahami dengan terbatas budaya dan mengutamakan agama sebagai nilai hidup utama hanya menghasilkan penyangkalan terhadap situasi hidup masyarakat Halmahera. Budaya yang hanya dipandang sebagai sebuah warisan yang terbatas pemaknaannya dengan tidak berupaya memahaminya sebagai nilai hidup mengakibatkan masyarakat tercabut dari akar tempat dimana masyarakat tersebut hidup. Sebaliknya mengutamakan budaya dan mengenyampingkan agama hanya menghasilkan sebuah pengingkaran terhadap kenyataan bahwa agama telah juga mewarnai

hidup masyarakat Halmahera. Dengan situasi yang demikian maka setiap agama sebaiknya mulai memeriksa ajaran dan keyakinan keagamaan mereka dalam relasi dengan nilai hidup masyarakat Halmahera.

POLA HUBUNGAN IDENTITAS AGAMA DAN SUKU PASCA KONFLIK DI HALMAHERA UTARA

Konflik jelas mempengaruhi makna dari hubungan kekeluargaan yang dipahami oleh masyarakat Halut. Masyarakat Halut mengenal setidaknya 3 (tiga) hubungan kekerabatan yaitu kerabat geneologis (hubungan darah), kerabat affinial (perkawinan) dan kerabat sosial (kesukuan). Untuk beberapa orang, hubungan kekeluargaan dalam garis keturunan yang sama merupakan sebuah faktor penting yang dipakai sebagai dasar untuk hidup bersama kembali sesudah terjadinya konflik. Hal seperti ini terlihat dalam proses pemulangan pengungsi ke tempat asal mereka. Dalam proses pemulangan tersebut, pihak yang menerima pemulangan baik dari Kristen maupun Islam menyeleksi nama-nama dari orang-orang yang akan kembali ke desa mereka. Mereka yang diijinkan kembali lebih dulu biasanya memiliki hubungan kekeluargaan yang cukup dekat dengan masyarakat yang menerima dan dianggap tidak terlibat secara langsung dalam peristiwa konflik.

Upaya menerima keluarga yang kembali setelah konflik dengan latar yang demikian jelas mengalami kesulitan tersendiri. Pada beberapa tempat, keluarga menerima kembalinya mereka yang mengungsi namun penerimaan tersebut tidak disertai perjumpaan dan komunikasi langsung dengan mereka yang kembali. Pendekatan kekeluargaan setidaknya telah menjadi sebuah jalan masuk bagi upaya memulihkan relasi Kristen – Islam. Dengan berbagai hambatan hubungan tersebut coba untuk di tata kembali demi kehidupan bersama yang lebih baik. Dalam kenyataannya relasi kekeluargaan yang tercipta sesudah konflik bergerak ke arah formalitas dengan mengutamakan penampakan dari hubungan tersebut. Masyarakat dari dua komunitas dalam hal ini menyadari bahwa agama yang mereka anut dan pengalaman konflik merupakan kenyataan yang tidak dapat begitu saja dihilangkan disamping kenyataan lain tentang adanya hubungan kekerabatan diantara mereka. Dalam perjumpaan langsung pendekatan kekeluargaan setidaknya merenggangkan sedikit dari ketegangan yang tercipta. Melalui perkunjungan dalam perayaan hari besar keagamaan dan dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh keluarga seperti

pernikahan dan juga dalam kedukaan masyarakat mencoba membentuk kembali kekerabatan yang ada.

Selain isu-isu yang sering muncul, hambatan yang cukup mengganggu dalam menata kembali kehidupan bersama adalah pada persoalan makanan dan minuman. Bagi komunitas Kristen, sikap yang ditunjukkan oleh umat Islam dengan tidak makan dan minum di keluarga mereka yang Kristen menunjukkan penolakan mereka terhadap pihak Kristen. Dalam hal ini komunitas Kristen menganggap komunitas Islam memandang rendah mereka dengan anggapan bahwa makanan dan minuman yang dihidangkan oleh orang Kristen semuanya haram. Dengan memandang haram terhadap keramahan tersebut berarti sama dengan memandang rendah umat Kristen. Komunitas Kristen mengetahui bahwa pemeluk pemeluk agama Islam tidak mengkonsumsi makanan tertentu yang dianggap haram dalam ajaran agama tersebut. Dengan pengetahuan ini komunitas Kristenpun tidak akan menghidangkan sesuatu yang dianggap haram oleh umat Islam dan karena itu penolakan ini dianggap sebagai penolakan secara langsung terhadap orang Kristen.

Bagi komunitas Islam, persoalan yang cukup mengganggu dalam relasi yang dibangun dengan pemeluk Kristen adalah pada soal penghargaan umat Kristen terhadap pelaksanaan ibadah puasa yang mereka jalankan. Saleh Tjan berpendapat bahwa ucapan selamat menjalankan puasa yang dipasang dalam bentuk baliho dan spanduk dari berbagai organisasi termasuk pihak gereja hanya sebatas spanduk yang tidak memiliki dampak apapun dalam kehidupan nyata. Aktivitas rumah makan yang tetap buka di siang hari maupun sarana hiburan malam yang juga tidak berhenti beroperasi menunjukkan dengan jelas sikap dari tidak adanya penghargaan bagi umat Islam yang sedang menjalankan puasa. Bagi Tjan kekerabatan akan lebih indah jika pihak Kristen memberikan penghargaan terhadap ibadah yang sedang dilaksanakan.

Selain kekerabatan, identitas kesukuan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi hubungan Kristen – Islam di Halut. Identitas ini bagai dua sisi dari mata uang yang sama. Sisi satu menampilkan kemungkinan untuk membangun kembali hubungan berdasarkan ikatan persaudaraan dari suku yang sama, namun di sisi yang lain menampilkan kecenderungan untuk merusak kembali upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mempererat hubungan antar masyarakat yang berbeda agama. Latar belakang sebagai anggota dari sebuah komunitas bersama

yang dipersatukan oleh tradisi bersama memberikan kemungkinan yang cukup baik bagi masyarakat untuk saling menerima walaupun berbeda agama.

Upaya rekonsiliasi masyarakat Tobelo dilakukan dengan mengedepankan pendekatan dalam ikatan kesukuan ini. Deklarasi damai yang ditandatangani oleh tokoh adat yang berasal dari Kristen dan Islam pada 19 April 2001 tersebut dinyatakan sebagai sebuah deklarasi dari masyarakat adat Hibualamo. Upaya ini tentu baik bahwa masyarakat berusaha bersatu dalam tatanan sebagai orang yang berasal dari latar belakang suku yang sama. Namun yang menjadi soal di sini adalah bahwa konflik yang terjadi merupakan konflik yang berkembang dalam pemahaman masing-masing pihak bahwa konflik tersebut merupakan konflik bernuansa agama. Penyelesaian konflik dengan mengedepankan pendekatan adat merupakan sebuah bentuk penyelesaian yang menimbulkan soal sendiri karena konflik ini bukanlah sebuah konflik/perang adat.

Berbeda dengan deklarasi Tobelo, deklarasi damai Galela yang dilaksanakan tanggal 30 Juni 2001 dengan jelas menyebutkan bahwa deklarasi ini dilaksanakan oleh masyarakat dari dua komunitas yaitu Kristen dan Islam. Isi dari deklarasi tersebut bergerak dari sebuah kondisi masa lalu yang diharapkan tidak lagi terjadi ke kondisi masa depan yang lebih baik dengan mengedepankan ikatan sebagai sesama orang Galela. Dari sini jelas bahwa pendekatan yang dilakukan dalam deklarasi Galela adalah pendekatan yang tidak menghilangkan kenyataan masa lalu namun masa lalu tersebut menjadi sebuah peringatan penting untuk menata kehidupan bersama.

Pendekatan hidup bersama dengan mengedepankan kesukuan bukan sesuatu yang tanpa masalah. Pada sisi yang lain identitas tersebut menjadikan masing-masing pihak merasa sebagai pemilik yang sah dari tradisi masyarakat asli Halut. Akibat dari hal ini adalah dalam beberapa peristiwa yang terjadi pada kehidupan masyarakat identitas tersebut dijadikan sebagai simbol tertentu dalam menghadapi sesama suku yang berbeda agama.

KESIMPULAN

Konflik dan peristiwa kekerasan sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan bangsa Indonesia yang multikultural dan multi etnik. Setiap gesekan atau konflik dapat berakhir dengan pembunuhan. Kalau yang terlibat adalah orang dari suku atau agama berbeda, bisa terjadi perang

suku atau perang agama. Perkembangan yang terjadi membuat masyarakat Halmahera Utara berada pada posisi yang cukup sulit antara nilai hidup lama dengan nilai baru yang masuk ke dalam kehidupan bermasyarakat pasca konflik sebagai akibat dari perkembangan. Tarik menarik antara nilai dan dengan nilai baru menghasilkan ketegangan yang dapat membuat masyarakat kehilangan identitas sebagai orang Halmahera.

DAFTAR PUSTAKA

- Aesh, A. N., 1993, Sejarah Wawasan Eklesiologi GMIH, dalam Kumpulan Seri Sejarah GMIH, Tobelo:Perpustakaan STT GMIH.
- A.Y.Cohen, 1970, Schools and Civilization States, dalam The Social Science and The Comparative Study of Education Systems. (Joshep Fischer; editor).Pennsylvania: International Textbook Company.
- Bellah, Robert N. 1993, Evolusi Agama, dalam Roland Robertson, Agama : Dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis, Jakarta : Rajagrafindo Perkasa.
- Boyd, Robert and Peter J., Richerson, 2005, The Origin and Evolution of Cultures, New York : Oxford Universtiy Press
- Buchori, Binny, dkk. 2001, Ketika Semerbak Cengkih Tergusur Asap Mesiu, Tragedi Kemanusiaan Maluku di balik Konspirasi Militer, Kapitalis Birokrat, dan Kepentingan Elit Politik, Jakarta : TAPAK AMBON
- Clifford Greetz, 1992, Politik Kebudayaan (terjemahan), Yogyakarta : Penerbit Kanisius
- Ebin Danius, April 2014, *Perubahan Makna dalam Relasi Kristen-Islam Di Halmahera Utara*, UNIERA
- Harold R. Issacs, 1993, Pemujaan Terhadap Kelompok Etnik (terjemahan), Jakarta, Yayasan Obor Indonesia,
- Hasan, Imron 2003, Memikirkan Kembali Maluku Dan Maluku Utara, Makasar : LepHas
- Hefner, Robert W, 2011, Politik Multikulturalisme, Yogyakarta : Kanisius
- Nanere, Jan, 2000, Halmahera Berdarah, Ambon : Bimaspela
- Parekh, Bikhu, 2012, Rethinking Multiculturalism (Keberagaman Budaya dan Teori Politik), Yogyakarta : Kanisius
- Sapsuha, M.Tahir. 2013, Pendidikan Pasca Konflik, Pendidikan Multikultural Berbasis Konseling Budaya Masyarakat Maluku Utara, Yogyakarta : LKIS